

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KAMPUNG PINTARENG KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA

DIRADIMALATA KAEHE
JOORIE.M.RURU
WELSON Y. ROMPAS

ABSTRAK

Community participation in development planning is very important for development planning. Because basically the planning process for village development cannot be separated from the participation of the community itself. The purpose of this study was to determine community participation in development planning in the Pintareng Village. This research uses descriptive qualitative research methods. Data collection techniques used are observation, interviews and data collection with documents. To see how community participation in development planning in the Pintareng village. The researcher uses three indicators namely : contribution of ideas, contribution of funds and goods and contribution of personnel. Based of the results of this study stated that community participation in development planning in the Pintareng village is still not good, because people are still less aware of the importance of them participating in development planning. Thus it can be concluded that the awareness of the community in development planning in the Pintareng village is still not good.

Keywords: society participation, Development Planning

PENDAHULUAN

Partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan seperti pikiran, tenaga, waktu, keahlian, dan modal. Sumaryadi (2005:46). Pengertian ini harusnya melekat pada seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Dalam hal ini terdapat kesenjangan antara proses pembangunan dari pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Karena pada dasarnya proses perencanaan untuk pembangunan desa tidak lepas daripada partisipasi masyarakat itu sendiri

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam perencanaan pembangunan, hal tersebut sejalan dengan pendapat Conyers (dalam Supriatna, 2000:155) mengemukakan tiga (3) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa mempunyai sifat yang sangat penting :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi dan atau sikap

masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.

2. Pembangunan akan mempercayai proyek atau program pembangunan mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut.
3. Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan indikator utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pada penjelasan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjelaskan pada tahapan perencanaan pembangunan diawali proses penyusunan rencana yang berbunyi: “melibatkan masyarakat (skateholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Diawali dengan penyelenggaraan musrembang tingkat desa, musrembang

tingkat kecamatan Masalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah kurangnya masyarakat untuk ikut terlibat untuk perencanaan pembangunan. hingga musrembang tingkat kabupaten.

Sudah seharusnya, masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan memberi diri untuk upaya pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan. Mulai dari menghadiri rapat Kampung seperti musrembang, dan di situ masyarakat diharapkan dapat mengeluarkan ide-ide mereka untuk perencan Dalam kegiatan musrembang tersebut diperlukan sinergi antara pemerintah Kampung dan masyarakat untuk menciptakan suatu kegiatan yang melibatkan keduanya agar terciptanya keseimbangan kewenangan antara pemerintah Kampung Pintareng dan masyarakatnya yang difokuskan pada kegiatan musrembang sebagai salah satu kegiatan yang memerlukan partisipasi masyarakat yang tinggi. an pembangunan. Sesuai dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sangat diperlukan, hal ini dapat dijadikan sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk memajukan daerahnya.

Tinjauan Pustaka

Konsep Partisipasi Masyarakat

Kata partisipasi sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, pengambilan keputusan, kebijakan dan pelayanan pemerintah. Partisipasi itu memiliki arti yang penting dalam kegiatan pembangunan.

Menurut Irene (2015:50) partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. nan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.

Menurut T. Ndraha (1990:34) partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama dalam pencapaian hasil dari program pembangunan yang tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa sebab, antara lain :

- a. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak.
- b. Pembangunan, meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itu.
- c. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat dapat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman mereka.

Keikutsertaan masyarakat adalah sangat penting di dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan selayaknya mencakup keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir. Oleh karena itu, Koho (2007:126) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang, yakni :

1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

Bentuk-Bentuk Partisipasi

Menurut Efendi (dalam Irene, 2015:58) partisipasi dapat dibagi menjadi partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal.

1. Partisipasi vertikal

Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien.

2. Partisipasi horizontal

Masyarakat mempunyai prakasa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini

merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat mampu berkembang secara mandiri.

Berbeda dengan pendapatnya Basrowi (dalam Irene, 2015:58) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilihat dan dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Partisipasi non fisik, adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah, pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak akan kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.
2. Partisipasi fisik, adalah partisipasi masyarakat yang dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah, menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya.

Macam-Macam Partisipasi Masyarakat

Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Irene, 2015:61), partisipasi dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu :

1. partisipasi dalam pengambilan keputusan
Partisipasi jenis ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi jenis ini sangat penting karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. adapun wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini bisa bermacam-macam seperti: hadir rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang di tawarkan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi jenis ini merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Dalam pelaksanaan program sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat
Partisipasi jenis ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kuantitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan “*output*”. Sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar presentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau tidak.
4. Partisipasi dalam evaluasi
Partisipasi jenis ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Indikator Partisipasi Masyarakat

Menurut Watson (Soetomo, 2008:214), faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah :

1. Faktor internal
Menurut Slamet (2003:137-143) faktor-faktor internal adalah berasal dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok di dalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan atau penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan,

keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

2. Faktor eksternal

Menurut Sunarti (dalam jurnal tata loka, 2003:9), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

Fungsi dan manfaat partisipasi

Menurut Carter (dalam Santoso, 2005:2), menyebutkan bahwa fungsi dari partisipasi masyarakat adalah :

1. Partisipasi masyarakat sebagai suatu kebijakan
2. Partisipasi masyarakat sebagai strategi
3. Partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi
4. Partisipasi masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa
5. Partisipasi masyarakat sebagai terapi.

Adapun manfaat dari partisipasi masyarakat adalah :

1. Menuju masyarakat yang lebih bertanggungjawab
2. Meningkatkan proses belajar
3. Meneliminir perasaan terasing
4. Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah
5. Menciptakan kesadaran politik
6. Keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
7. Menjadi sumber dari informasi yang berguna merupakan komitmen sistem demokrasi.

Masalah-Masalah dalam Partisipasi Masyarakat

Angel (dalam Firmansyah 2009), mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa masalah.

Pertama, masalah ada pada :

1. Tahapan perencanaan pembangunan, partisipasi didefinisikan sebagai kemauan masyarakat secara penuh untuk mendukung pembangunan yang direncanakan dan ditetapkan sendiri oleh pemerintah, sehingga masyarakat bersifat pasif dan hanya sebagai sub-ordinasi pemerintah.
2. Tahapan pelaksanaan pembangunan di lapangan, pembangunan yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah didefinisikan sebagai kebutuhan masyarakat sedang yang dirancang dan atau ditetapkan masyarakat didefinisikan sebagai keinginan masyarakat yang memperoleh prioritas yang sangat rendah.

Konsep Perencanaan

Menurut Abe (2001) dalam Ovalhanif (2009), adalah susunan sistematis mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi-potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut David (2011), perencanaan adalah proses dimana seseorang menentukan apakah ia akan menyelesaikan tugas dengan cara yang berbeda dari cara paling efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan mempersiapkan untuk mengatasi kesulitan tak terduga dengan sumber daya yang memadai.

Tujuan Perencanaan

Setiap organisasi tentunya memiliki tujuan yang berbeda-beda, dan tentu saja perencanaan yang dibuat akan berbeda-beda. Namun, pada dasarnya tujuan organisasi melakukan perencanaan adalah untuk :

1. Mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi.
2. Memberikan arahan kepada administrator maupun non administrator agar bekerja sesuai dengan rencana

Manfaat Perencanaan

Perencanaan bermanfaat sebagai :

1. Standar pelaksanaan dan pengawasan,
2. Pemilihan berbagai alternatif terbaik,
3. Penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan,
4. Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi,
5. sesuai dengan rencana

Proses Perencanaan

Proses perencanaan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pendahuluan
2. Mengidentifikasi permasalahan pendidikan
3. Analisis area masalah perencanaan
4. Penyusunan konsep dan rencana
5. Mengevaluasi rencana
6. Menentukan rencana

Konsep Pembangunan Desa

Pengertian Pembangunan

Sondang (dalam Pranoto, 2011), mengemukakan arti pembangunan adalah :

- a. seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa, dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara dan pemerintah, menuju mordenitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah (2005), mendefinisikan pembangunan bisa saja diartikan sebagai berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Pembangunan, yang merupakan rangkaian usaha perubahan dan pertumbuhan yang berencana dilakukan secara sadar suatu Bangsa, Negara, dan pemerintah menuju mordenitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Gabungan kedua pengertian mengandung beberapa pokok pikiran sebagai berikut :

- a. Pembangunan merupakan suatu proses, oleh karena itu, harus dilaksanakan secara terus-menerus, berkesinambungan, tahapan, jangka waktu, biaya, dan hasil tertentu yang diharapkan.
- b. Pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan merupakan hasil pemikiran sampai pada tingkat rasionalitas tertentu.
- c. Pembangunan dilakukan secara berencana.
- d. Menemukan cara hidup yang lebih baik dari sebelumnya, lebih maju, serta dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek.

Pelaku-Pelaku Pembangunan

Mardikanto (2012:22), dalam setiap proses pembangunan melibatkan sub-sistem pelaku pembangunan, yaitu sub sistem pemerintah dan penggerak sub-sistem masyarakat atau pengikut. Sub-sistem pemerintah dan penggerak merumuskan perencanaan dan berkewajiban untuk mengorganisasi dan menggerakkan warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Maksud sub-sistem pemerintah dan penggerak dari Mardikanto (2012:22), adalah semua aparat pemerintah, penyuluh (*change agent*), pekerja sosial, tokoh-tokoh masyarakat (formal dan informal), aktivitas LSM/LPSM yang terlibat dan berkewajiban untuk :

- a. Bersama-sama warga masyarakat merumuskan dan mengambil keputusan dan selanjutnya memberikan legitimasi tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan.
- b. Menginformasikan dan atau menerjemahkan kebijakan dan perencanaan pembangunan kepada seluruh warga masyarakat.
- c. Mengorganisir dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

- d. Bersama-sama masyarakat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.
- e. Mengupayakan pemerataan hasil pembangunan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya yang terlibat langsung sebagai pelaksana dan atau dijadikan sasaran utama pembangunan secara adil.

Sedang yang dimaksud juga oleh Mardikanto (2012:22), dengan sub-sistem masyarakat atau pengikut, adalah: sebagian besar warga masyarakat yang tidak termasuk dalam sub-sistem pemerintah/penggerak diatas, yang berkewajiban untuk:

- a. Menyampaikan ide-ide atau gagasan tentang kegiatan pembangunan yang perlu dilaksanakan, dan cara mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan, baik secara langsung maupun melalui perwakilannya yang sah dalam suatu forum yang diselenggarakan untuk keperluan tersebut.
- b. Secara positif menerima dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan, sejak pengambilan keputusan tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan pengawasan, dan upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan secara adil sesuai fungsi dan pengorbanan yang telah diberikan.
- c. Memberikan masukan atau umpan balik tentang kegiatan pembangunan kegiatan yang dilaksanakan. Menerima dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan Desa

Pengertian Desa

Desa adalah bentuk dari suatu negara yang terkecil maka perlu menjadi perhatian khusus akan desa itu sendiri, apalagi dengan keluarnya undang-undang desa No 06 tahun 2014 maka di sini sangat jelas desa sangat diperhatikan baik secara asal-usulnya anggaran maupun proses berkembangnya desa itu kearah yang lebih baik, yang mana kalau

desa makmur maka Negara pun akan mendapat dampaknya. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah :

- a. Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan atas asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggara pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berBangsa dan berNegara;
- b. Partisipasi, memiliki sebuah makna bahwa penyelenggara pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa;
- c. Otonomi, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman;

Pengertian pembangunan desa

Sesuai dengan undang-undang No 06 tahun 2014 tentang desa pasal 78 mengatakan bahwa :

- a. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

- b. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- c. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengaruh utama perdamaian dan keadilan sosial.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komoditas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama.

Yadav (2013:82), mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam: pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil.

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
 Pada umumnya, semua program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan

tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau ditingkat lokal.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
 Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya didalam kegiatan pembangunan. Dilain pihak, lapisan yang diatasnya yang umumnya terdiri dari orang-orang kaya di dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proporsional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan yang lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan. Disamping itu, yang sering dilupakan dalam pelaksanaan pembangunan adalah, partisipasi masyarakat dalam, pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati (tampa penurunan kualitasnya), dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Metode penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek-subjek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan sebagainya), berdasarkan

fakta-fakta yang nyata atau sebagaimana adanya. Dalam hal ini adalah gambaran bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Sangihe. Sedangkan pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian naturalistik, karena fokus penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah atau sering disebut metode “etnografi” (Sugiyono,2012).

Teknik Pengumpulan Data

Metode atau cara yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data-data secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti, sebagai berikut :

1. Pengamatan (observasi)

Menurut Serdamayanti dan Hidayat (2011:75), Observasi yaitu pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi atau metode pengamatan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung. Dalam konteks natural (asli), dari kejadian pelakunya yang berpartisipasi secara wajar dalam interaksi dan observasi ini menelusuri aliran alamiah dalam kehidupan sehari-hari.

2. Wawancara

Menurut Benny dan Huges (dalam Sedarmayanti dan Hidayat, 2011:80) Wawancara merupakan cara yang umum dan ampuh untuk memahami sesuatu keinginan atau kebutuhan. Wawancara merupakan interaksi antar manusia. Teknik ini dimaksudkan agar peneliti mampu mengeksplorasi data dari informan yang bersifat nilai, makna dan pemahamannya.

3. Pengumpulan Data Dengan Dokumen

Menurut Sugiyono (2016:82), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa

gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada penelitian skripsi ini berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Sangihe, untuk menilai Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan terdapat sejumlah indikator yaitu sebagai berikut, sumbangan pemikiran (ide atau gagasan), sumbangan dana dan materi, sumbangan tenaga (bekerja). Pembahasan mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan sesuai dengan ketiga indikator dalam penilaian Partisipasi Masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Sumbangan Pemikiran (Ide atau Gagasan) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kampung Pintareng. Partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan pemikiran (ide atau gagasan) dalam perencanaan pembangunan itu merupakan peran penting masyarakat, karena dalam perencanaan pembangunan, sangat diharapkan untuk masyarakat dapat memberikan ide atau gagasan mereka, agar supaya masyarakat juga ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan dan bukan hanya pemerintah. Melalui partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan pemikiran maka merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, dari pengamatan ada sebagian masyarakat Kampung Pintareng masih belum sadar

akan pentingnya mereka berpartisipasi dalam memberikan ide atau gagasan untuk perencanaan pembangunan di Kampung Pintareng. Jika tanpa adanya masyarakat turut berpartisipasi dalam memberikan ide atau gagasan maka masyarakat tidak akan nampak kerja samanya dengan pemerintah. Ini perlu adanya kesadaran diri dari masyarakat sekitar akan pentingnya mereka untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, agar masyarakat nampak kerja samanya dengan pemerintah yang ada di Kampung Pintareng.

Dari pemerintah setempat sudah mengsosialisasikan program-program yang telah di sediakan oleh pemerintah, seperti di papan pengumuman kampung. Dalam perencanaan pembangunan yaitu seperti diadakannya musyawarah rencana pembangunan (musrembang).

Dari kegiatan pemerintah tentang perencanaan pembangunan itu tergantung dari masyarakat sekitar, apakah masyarakat akan ikut berpartisipasi atau tidak. Dikarenakan proses pembangunan tersebut akan sangat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. karena itu partisipasi dari masyarakat sangat diharapkan keterlibatannya dalam menyumbangkan ide atau gagasan dengan diadakannya perencanaan pembangunan.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Sumbangan Dana dan Materi Dalam Perencanaan Pembangunan di Kampung Pintareng.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan dana dan materi adalah berupa sumbangan untuk program pembangunan yang ada di Kampung Pintareng, yang secara sukarela diberikan oleh setiap individu. Karena sumbangan dana dan materi juga sangat berdampak baik bagi proses pembangunan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan penelitian yang diteliti oleh peneliti sendiri di Kampung Pintareng untuk sumbangan dana dan materi, masyarakat hanya menyumbangkan sumbangan materi seperti, semen, batu, pasir. dan untuk sumbangan dana itu sudah masuk di dana APBD.

Dari pihak pemerintah sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat hanya akan memberikan sumbangan materi, sumbangan pemikiran (ide atau gagasan) dan sumbangan tenaga (bekerja). dan dari pemerintah juga mengharapkan kerja sama yang baik dari masyarakat untuk bisa bersama-sama berpartisipasi.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Sumbangan Tenaga (Bekerja) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kampung Pintareng.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan tenaga (bekerja) dalam suatu perencanaan pembangunan di kampung Pintareng adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk fisik atau tenaga oleh masyarakat untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program, seperti perencanaan pembangunan yang ada di Kampung Pintareng.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian dari peneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan tenaga (bekerja) dari pemerintah setempat sudah mengsosialisasikan tentang bagaimana peran masyarakat dalam berpartisipasi secara tenaga merupakan posisi yang penting untuk perencanaan pembangunan. Dan dari kepala-kepala lindungan selalu memberikan saran atau motivasi kepada masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, akan tetapi masih banyak masyarakat Kampung pintareng yang

tidak terlibat dan masih kurang sadarnya masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh dalam perencanaan pembangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti melalui pengamatan, pengumpulan data dan proses wawancara mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Sangihe masih kurang baik. Dari masyarakat sendiri harus lebih meningkatkan kesadaran mereka tentang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, yang dilihat dari sumbangan pemikiran (ide atau gagasan), sumbangan materi (dana dan barang) dan sumbangan tenaga (bekerja).

Partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan (ide atau gagasan) masih kurang baik, karena sebagian dari masyarakat yang ada masih belum sadar dan memahami akan pentingnya mereka untuk ikut berpartisipasi dalam menyampaikan ide atau gagasan mereka untuk perencanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan materi cukup baik, dan untuk sumbangan dana dari masyarakat sudah tidak ada, alasannya, karena sumbangan ini sudah ditanggung oleh pemerintah sendiri melalui APBD, namun untuk terealisasinya perencanaan pembangunan masih kurang maksimal

Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga (bekerja) masih kurang baik dikarenakan masih ada sebagian masyarakat yang tidak ikut terlibat atau tidak berpartisipasi dalam memberikan sumbangan tenaga dengan diadakannya perencanaan pembangunan yang ada di Kampung Pintareng.

Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan serta dari kesimpulan di atas,

adapun saran yang dapat penulis berikan dalam rangka meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Sangihe yaitu :

Untuk sumbangan ide dan gagasan dari masyarakat Lebih ditingkatkan, karena memang ada masyarakat yang memberikan ide dan gagasan mereka tetapi hanya sebagian dari masyarakat yang ada. Karena itu peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan harus lebih ditingkatkan lagi.

Peneliti menyarankan agar dari pemerintah Kampung Pintareng dapat mengelolah dana APBD yang ada dan sumbangan materi yang diberikan masyarakat dengan baik guna demi perencanaan pembangunan di Kampung Pintareng kedepannya.

Untuk masyarakat peneliti menyarankan lebih ditingkatkan lagi kesadarannya untuk ikut melibatkan diri dalam perencanaan pembangunan, agar supaya partisipasi dari masyarakat itu sendiri nampak.

Pemerintah kampung lebih mensosialisasikan program perencanaan pembangunan secara transparan kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat lebih memahami dan ikut melibatkan diri dalam program perencanaan pembangunan dan dapat berkoordinasi secara bijaksana dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Riyadi dan Deddy Supriadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sumaryadi.2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama

- Dwiningsi, Siti Irene Astuti. 2015. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Easterly, Willian. 2007. *The ideology of Development, Foreign Policy*
- Marzuki, Muhammad. 2004. *Pendekatan dan Proses Pembangunan Partisipasif, Modul PKM*. Jakarta. Departement Dalam Negeri
- Ndaraha, Taliziduhu. 2007. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Penerbit Yayasan Karya
- Santoso. 2005. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni
- Sedermayanti, dan Hidayat. 2011. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandala Maju
- Soetrisno Loekman. 2005. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kansius
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: SETARA Press
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif*. Bandung: alfabet
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta cv.
- Slamet. 2003. *Membentuk Pola Pikir Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB. Press
- Widjaya. HAW. 2003. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Rajawali Press
- Widjaya. 2003. *Pemerintah Desa/Masyarakat*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada

Sumber Lain:

- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014